

BAB IV

FAKTOR PEMERINTAH PERANCIS MENGAMBIL KEBIJAKAN DEPORTASI

Bab IV ini merupakan bab penjelasan yang berkaitan dengan teori yang digunakan oleh penulis. Pembahasan ini masuk ke dalam faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan Pemerintah Perancis dalam mengambil sebuah keputusan dan menjadi sebuah kebijakan. Merupakan lanjutan dari bab sebelumnya yang juga membahas mengenai penolakan Perancis terhadap campur tangan dari Uni Eropa.

Membahas mengenai kepentingan Nasional Perancis sendiri, selaku Negara ygn berdaulat dan pertimbangan untung rugi Pemerintah Perancis sehingga pada akhirnya mengambil keputusan tersebut.

A. Kepentingan Nasional Perancis

Dalam menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan 2 Teori, salah satunya Teori Rational Choice. Teori ini memiliki 3 elemen, yaitu;

1. *Methodological individualism*
2. *Goal seeking*
3. *The existence of various institutional*

Pada elemen kedua, individu diasumsikan bertindak untuk dapat memaksimalkan fungsi mereka walaupun pada keadaan berkendala ataupun adanya tekanan. Sebelum membuat keputusan, individu menetapkan tujuan yang diinginkan kemudian mencari dan menyusun tindakan-tindakan alternative yang maksimal untuk tetap mencapai tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, tentu tujuan dari Perancis adalah memenuhi kepentingan nasional negaranya. Kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil

keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas.¹

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu Negara. Kepentingan ini bisa dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari dengan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga Negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan Negara agar mendapat pengakuan dunia. Peran suatu Negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai Negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu Negara.²

Kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan target utama yang harus dicapai oleh negara tersebut. Dengan kata lain, kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan negara yang bersifat penting yang kemudian mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya³. Maka dari itu Pemerintah Perancis

¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

² P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163

³ Anak A.Perwita, & Yanyan Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

pada saat itu menimbang apakah keputusan itu yang diambil dapat mencapai kepentingan nasional Perancis. Kepentingan nasional terdiri dari⁴ :

1. Kepentingan keamanan nasional
2. Kepentingan pengembangan ekonomi
3. Kepentingan peningkatan kekuatan nasional
4. Kepentingan prestise nasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis kepentingan sebagai variable sebagai pertimbangan untung rugi teori *Rational Choice*. Berikut variabelnya:

1. Kepentingan Keamanan Nasional

Menurut kamus besar Indonesia, keamanan nasional adalah suatu keadaan negara atau bangsa yang aman, tentram, dan bebas dari rasa takut atau khawatir, dari ancaman dan gangguan.⁵ Keamanan nasional lazim dimiliki oleh setiap Negara dalam mempertahankan persatuan dan ketahanan negara, yang mana konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer.⁶ Keamanan Nasional dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, Keamanan Nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia disamping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan

⁴Kepentingan Nasional dalam hubungan Internasional, http://nadiashabrina-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84918-SOH101-KEPENTINGAN-NASIONAL-DALAM-HUBUNGAN-INTERNASIONAL.html, diakses 3 November 2017

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1989.

⁶ *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, terdapat pada www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-september/000902.html, diakses pada 1 november 2017.

bervariasi tergantung kepada tata nilai, persepsi dan kepentingan⁷.

Oleh karena itu, keamanan nasional merupakan faktor yang penting untuk menjaga stabilitas sebuah Negara, karena tidak dipungkiri bahwa keamanan nasional akan mencakup banyak aspek terutama untuk menjaga kelangsungan hidup dari rakyat yang berada di Negara tersebut. Dalam kasus yang terjadi antara pemerintah Perancis dengan etnis Roma ini, sangat jelas bahwa kepentingan keamanan nasional Perancis merupakan salah satu alasan mengapa pada akhirnya pemerintah Perancis memutuskan untuk tetap mendeportasi etnis Roma. Dimulai dari adanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh beberapa orang dari etnis Roma yang tentu akan mengancam keamanan warga Perancis sendiri. Dimana kita tahu bahwa setelah adanya kasus kriminal oleh salah satu warga etnis Roma, warga etnis Roma yang lain melakukan demonstrasi di kantor kepolisian setempat.

Pemerintah Perancis berhak untuk melakukan berbagai cara untuk mempertahankan dan menjaga keamanan maupun kelangsungan hidup dari warganya, dan kebijakan ini pun tentu diambil sebagai bentuk kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah Perancis dalam mencapai keamanan nasional.

2. Kepentingan Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam stabilitas sebuah Negara. Pengembangan ekonomi ialah fokus pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, dukungan inovasi dan gagasan baru, penciptaan kekayaan yang lebih tinggi, dan penciptaan kualitas hidup yang

⁷ Bambang Darmono, Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia.

lebih baik secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi sering didefinisikan oleh orang lain berdasarkan apa yang ingin dicapai. Sering kali tujuan ini meliputi membangun atau memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, dll; Memperbaiki sistem pendidikan melalui sekolah baru; Meningkatkan keamanan publik melalui layanan pemadam kebakaran dan polisi; Atau memberi insentif kepada bisnis baru untuk membuka lokasi di sebuah komunitas⁸.

Kepentingan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu Negara. Aspek ekonomi ini merupakan aspek mendasar dalam kehidupan bernegara dan dari ekonomi inilah suatu Negara dapat dilihat apakah Negara tersebut baik atau buruk dalam hal mensejahterakan rakyatnya, karena kualitas baik ataupun buruknya perekonomian sebuah Negara akan mempengaruhi kehidupan Negara secara keseluruhan. Dengan adanya imigran, tentu ini akan mempengaruhi perekonomian Perancis baik itu dalam konteks rendah ataupun tinggi. Misal dari segi lapangan pekerjaan yang tentu nya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi yaitu lapangan pekerjaan yang harus dibagi dari warga perancis asli dengan imigran etnis Roma ini.

B. Pertimbangan Untung Rugi

Dalam teori *Rational Choice* pada elemen terakhir yaitu *the existence of various institutional* menjelaskan bahwa individu tidak langsung memutuskan sesuatu tetapi mencoba untuk menimbang dan memilih dahulu tindakan alternative yang ada, dengan mempertimbangkan keterbatasan lingkungan fisik dan sosial mereka. Ini pula yang dipertimbangkan oleh Nicholas Sarkozy sebagai kepala Negara Perancis pada sat itu untuk pada akhirnya memilih keputusan untuk mendeportasi

⁸Aaron Hill, <http://study.com/academy/lesson/what-is-economic-development-definition-examples.html>, diakses pada 1 November 2017

etnis Roma dari Perancis. Pertimbangan untung rugi tentu menjadi hal yang patut diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Tergantung dimana nanti pada akhirnya, sebuah keuntungan ataupun kerugian kah yang akan didapat oleh suatu Negara dalam pengambilan keputusan tersebut.

1. Kerugian Perancis mendeportasi Etnis Roma

A. Pemberitaan Negatif oleh Media Massa

Banyaknya pemberitaan media online maupun cetak yang mengangkat permasalahan pemerintahan Perancis dengan etnis Roma tentu lebih atau kurangnya merugikan pemerintah Perancis. Banyak pemberitaan ini tentu membuat judgment dari berbagai pihak yang membacanya, bahkan ada beberapa media massa yang juga mengangkat isu HAM terkait kebijakan pemerintah Perancis untuk mendeportasi etnis Roma yang berada di wilayahnya. Salah satu contoh pemberitaan media online yang mengangkat berita terkait deportasi yang dilakukan oleh Perancis ini terdapat pada berita yang dipaparkan oleh theguardian.

France's deportation of Roma shown to be illegal in leaked memo, say critics

Free movement, not free settlement, says minister as order suggests Sarkozy policy saw ethnic minority camps singled out

France's deportation of Roma was defended by immigration minister Eric Besson after a leaked memo suggested the minority were being singled out.

Paris

Mon 13 Sep '10

France vowed today to continue deporting Roma Gypsies after critics claimed a leaked document suggesting they are being targeted on President Nicolas Sarkozy's orders means the

expulsions are against the constitution and break international human rights laws on discrimination.

The leaked memo emerged a few days after France's immigration minister, Eric Besson, insisted that sending police to destroy camps and settlements and ordering inhabitants to leave France was not aimed at the Roma. He insisted they were being treated no differently to other EU migrants who do not meet France's residency rules.

However, the internal order, circulated to police chiefs last month as France began expelling nearly 1,000 Roma Gypsies to Romania and Bulgaria, appeared to confirm the ethnic minority was being singled out.

Today Besson repeated his claim: "France has not taken any measure specifically against the Roma [who] are not considered as such but as natives of the country whose nationality they have," he said.

However, a leaked memo, dated 5 August 2010 and signed by the chief of staff for interior minister Brice Hortefeux, reminds French officials of a "specific objective" set out by Sarkozy.

"Three hundred camps or illegal settlements must be evacuated within three months; Roma camps are a priority," the memo reads. "It is down to the préfet [state representative] in each department to begin a systematic dismantling of the illegal camps, particularly those of the Roma."

Besson told France 2 state television that he was not aware of the leaked circular: "I wasn't a recipient, and therefore I didn't need to know about it," he said.

He refused to make any further comment but added: "The concept of ethnic minorities is a concept that does not exist among the government."

Later, in a press conference, he said: "We will maintain our policy of expelling illegal immigrants. This is not something new." He said 5,000 Romanians and Bulgarians had been expelled so far this year, compared with 10,000 in 2009.

He admitted there had been an increase in deportations since August, following "Nicolas Sarkozy's demand to go ahead with the dismantling of all illegal camps".

In what was seen as a criticism of the Romanian authorities, he added: "Free movement in the European area doesn't mean free settlement. What has been forgotten is that each of the European countries is responsible for its own national citizens."

The document has sparked furious reactions from the opposition and critics of the expulsions. The Group for Information and Support for Immigrants (Gisti) says it is examining the memo to establish if it breaks any criminal laws.

"Can you imagine a circular specifically naming Jews or Arabs?" said Stephane Maugendre, a lawyer and president of Gisti.

The Socialist party has also questioned whether the document is legal and said it smacked of "xenophobic policy".

"I ask the European commission and its president José Manuel Barroso to initiate infringement proceedings against the French government to end the indignity and stigma unacceptable to the European citizens that are Roma," said Harlem Désir, a French Socialist MEP.

France is continuing the Roma deportations despite vehement criticism at home and from the EU and United Nations. Last Thursday the European parliament passed a resolution by 337 votes to 245 calling on Paris to "immediately suspend all expulsions of Roma", saying the policy "amounted to discrimination".

The MEPs admitted their demands were not legally binding but pointed out that mass expulsions are prohibited under EU law "since they amount to discrimination on the basis of race and ethnicity".

Belgian MEP Guy Verhofstadt, a former prime minister, said it was unacceptable for politicians to be "tempted by populist, racist and xenophobic policies".

German MEP Martin Schulz, head of the European parliament's socialist group, said: "The country that gave us liberté, égalité and fraternité has taken a different, regrettable path today."

The French authorities appear determined and defiant in the face of such international condemnation. Yesterday officials in Marseille announced more than 100 Roma would be flown back to their home countries today having accepted €300 to return.

Several groups representing immigrant organisations plan to ask the French Council of State to consider the leaked memo to see whether it contravenes the French Constitution. If the Council, the country's highest administrative court but made up of government members, is formally approached the authorities may be forced to temporarily suspend expulsions of Roma. The French government would be at liberty to then send around

*another memo, but one that did not specifically mention the Roma.*⁹

Berita tersebut hanya merupakan salah satu dari banyaknya berita media massa ataupun online yang mengangkat kasus Perancis dengan etnis Roma.

B. Teguran dari Uni Eropa

Uni Eropa sebagai organisasi dan badan otonom yang menaungi Perancis pun melakukan beberapa tindakan terkait kebijakan pemerintah Perancis tersebut. Dimana kita tahu bahwa Perancis dan Rumania sebagai Negara asal dari etnis Roma yang berada di Perancis ini merupakan satu wilayah di Eropa dan dinaungi oleh Uni Eropa pula.

Uni Eropa sendiri sebelumnya sudah mempunyai perjanjian-perjanjian antar Negara anggota salah satunya adalah *Free Movement of People* yang mempermudah warga Uni Eropa untuk berpindah dari satu Negara ke Negara yang lain karna adanya pengurangan formalitas administrasi.¹⁰

Apa yang dilakukan Perancis ini mendapat sorotan dari anggota parlemen Uni Eropa, adanya beberapa teguran pribadi misal yang dilakukan oleh Viviane Reding dan Martin Schulz yang menanyakan dan menegur karna Perancis dinilai terburu-buru dan tidak melakukan

⁹ “*France's deportation of Roma shown to be illegal in leaked memo, say critics*”, <https://www.theguardian.com/world/2010/sep/13/france-deportation-roma-illegal-memo>

¹⁰ Directive 2004/58/EC of the European Parliament and of the Council of April 29, 2004 on the Right of Citizens of the Union and their Family Members to Move and Reside Freely within the Territory of the Member States, 2004 O.J.

intrograsi mendalam dalam kasusnya dengan etnis Roma. Selain beberapa teguran dari anggota parlemen, Perancis juga mendapatkan surat teguran dan juga melakukan teguran public yang kuat untuk kebijakan Perancis untuk mendeportasi etnis Roma ini.¹¹ Selain itu, Amnesti Internasional pun juga ikut turun tangan terkait kasus Perancis dengan etnis Roma ini dengan menegur Uni Eropa untuk meneruskan pesan agar pemerintah Perancis menghentikan tindakan deportasi secara berkali-kali kepada etnis Roma.¹²

Komisi mengambil langkah awal pertama untuk memperingatkan Prancis bahwa hal tersebut akan berhadapan dengan proses hukum apabila hal tersebut menemui kegagalan dalam meminimalisir penjagaan Uni Eropa dalam hal pengimplementasian perlindungan atas hak warga Uni Eropa dengan penyerahan Pemerintah Prancis melalui sebuah surat resmi.¹³ Kasus hukum dan surat terlampir merepresentasikan langkah pendahuluan atas langkah hukum dan memberikan tuduhan kepada Prancis atas tidak dapatnya Negara tersebut dalam melindungi suatu etnis dengan dalam peraturan nasionalnya dan standar Uni Eropa.¹⁴

2. Keuntungan Perancis mendeportasi Etnis Roma

A. Keamanan

¹¹ Severance, Kristi. "France's Expulsion of Roma Migrants: A Test Case of Europe" www.migrationpolicy.org. 3 agustus 2017.

¹² Jay Carmella, Rights Group Urges EU Nations to Stop Forced Roma Deportation, JURIST LEGAL NEWS & RES. (Sept. 28, 2010), <http://jurist.org/paperchase/2010/09/rights-group-urges-eu-nations-to-stop-forced-romadeportation.php>.

¹³ Stephen Castle, *France Faces European Action after Expulsions*, www.nytimes.com. 30 juli 2017

¹⁴ Ibid.

Sebuah kewajiban Negara untuk menjaga keamanan warganya dalam hidup bernegara. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kondisi internal negaranya, karena keamanan merupakan kebutuhan dasar dari umat manusia yang tidak lepas dari tata nilai, persepsi, dan kepentingan¹⁵.

Kasus kriminalitas yang melibatkan etnis Roma sebagai tersangka yang terjadi di Perancis tentu mengancam keamanan warga Perancis. Salah satunya adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh imigran etnis Roma dan membuat kepolisian setempat menembak tersangka. Tidak jauh berbeda, kasus yang lain adalah ketika salah satu pemuda etnis Roma melarikan diri dari tempat dimana adanya titik pemeriksaan polisi pada awal tahun 2010.¹⁶ Dua kejadian tersebut membuat sekumpulan etnis Roma yang berada di Perancis pun melakukan demonstrasi ke kepolisian setempat karena merasa tidak terima dengan adanya penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka tersebut.

Pernyataan Sarkozy yang juga dibenarkan oleh staff negaranya adalah Sarkozy melakukan klaim bahwa 20 persen etnis Roma telah melakukan perampokan dan kejahatan di wilayah Perancis.¹⁷ Sebagai kepala Negara maupun orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Sarkozy ini, mereka tentu tidak menginginkan keselamatan dari warga atau penduduk asli Perancis terancam dengan adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh etnis Roma,

¹⁵ Bambang Darmono, Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia.

¹⁶ "Frances feras widespread rioting as youths rampage after police shoot robber." www.newsassociates.co.uk. 1 agustus 2017.

¹⁷ Edward Cody, "France Weighs Immigration Bill", WASH.POST.

karena bagaimanapun adalah sebuah kewajiban Negara terkhusus pemerintah untuk menjaga keamanan warganya.

Pada tahun 2012, National Gendamerie membuat suatu alat rekam statistik yang bertujuan untuk membedakan data statistik yang dicatat oleh Polisi nasional Prancis. Sebelumnya, data kejahatan yang ada merupakan data kejahatan secara keseluruhan yang terjadi di Perancis. Dengan alat rekam yang baru dibuat tersebut tentu memudahkan kepolisian untuk mengelompokkan tindak kejahatan yang ada di Perancis, baik itu data tindak kejahatan non fisik seperti pencopetan, pelanggaran terkait izin tinggal, selain itu ada data kejahatan fisik, bunuh diri, dan juga data tindak korupsi di Perancis.¹⁸

Alat rekam ini mulai digunakan pada tahun 2011, 2012, hingga sekarang. Pada tahun 2012 terdapat 756.400 kejahatan non-fisik yang dicatat oleh Kepolisian Nasional Prancis. Dari keseluruhan data kejahatan non fisik yang ada, 40% dari jumlah tersebut merupakan pelanggaran terhadap izin tempat tinggal serta masuknya warga asing ke Prancis. Jumlah dari data kejahatan non fisik tersebut mengalami penurunan sebesar 5 % sejak tahun 2007. Sedangkan pelanggaran terkait izin tinggal sejak 2009 hingga 2012 mengalami penurunan sebesar 1.5 %.¹⁹

Dari data tersebut, baik itu kejahatan non fisik secara keseluruhan ataupun pelanggaran terkait izin tinggal mengalami penurunan. Data tersebut membuktikan bahwa keputusan presiden Nicholas Sarkozy untuk memberlakukan kebijakan deportasi terhadap imigran etnis Roma berhasil. Penurunan jumlah kejahatan non fisik

¹⁸ INSEE, “Criminalité – Délinquance”

¹⁹ Ibid.

mengalami penurunan setelah Nicholas Sarkozy mendeportasi etnis Roma dari negaranya.

B. Ekonomi

Pada saat suatu Negara menerima datangnya imigran, tentu perbandingan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah imigran sangatlah jauh. Di Negara-negara Eropa setiap tahunnya perekonomian dan teknologi semakin maju, sehingga Negara-negara di Eropa lebih membutuhkan tenaga-tenaga kerja ahli yang memiliki keterampilan untuk bekerja di negaranya. Pekerjaan kasar yang pada awalnya ditujukan kepada para imigran yang menjadi buruh sekarang menjadi semakin sedikit karena tuntutan akan permintaan pekerja yang memiliki skill. Tetapi sebagian besar imigran yang masuk ke Negara-negara Uni Eropa tidak memiliki itu dan juga pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih diprioritaskan kepada warga asli. Hal ini tentu akan menimbulkan pengangguran structural, yakni sebuah keadaan dimana pekerja yang mencari lapangan pekerjaan tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh si pembuka lapangan pekerjaan.²⁰

Kedatangan imigran tentu salah satunya bertujuan untuk memperbaiki nasib dengan mencari pekerjaan. Selain kerugian pengangguran dan ketimpangan yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan adanya imigran ini untuk para pemilik modal dan usaha para imigran dengan kualifikasi lebih rendah dari tenaga kerja Prancis memberi

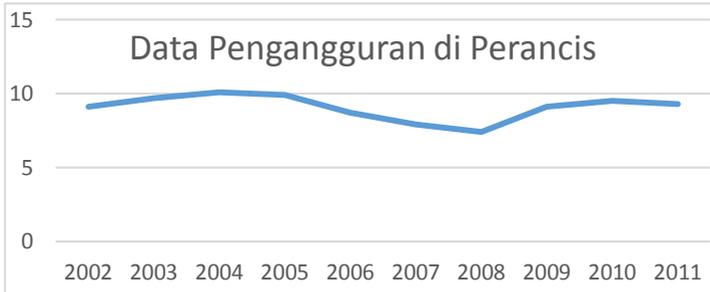
²⁰ Ari Ramadhan, *“Permasalahan Kerjasama Uni Eropa dalam Menghadapi Isu Pencari Suaka”*, Skripsi S1 Hubungan Internasional, UMY, 2016, hal 74-75.

suatu keuntungan tersendiri. Dengan mempekerjakan tenaga kerja yang tidak berketerampilan, para pemilik modal membayar lebih murah. Ditambah lagi, seringkali para imigran yang masuk dalam pasar tenaga kerja Prancis memiliki masalah dengan ijin tinggal mereka. Hal itu akhirnya justru semakin menguntungkan pemilik modal karena mereka dapat menekan harga hingga serendah mungkin, bahkan lebih rendah dari tenaga kerja Prancis dengan kualifikasi yang sama.

Kedatangan dari para imigran terlebih dalam konteks masalah ini adalah imigran illegal tentu menjadi sebuah dilema untuk pemerintah Perancis karna untuk Prancis sendiri sulit diketahui keuntungan ekonomis dari keberadaan imigran. Di mata hukum Prancis, imigran memiliki kewajiban fiskal yang sama dengan warga Prancis. Dan melihat kenyataan bahwa imigran yang datang adalah mereka yang berada dalam kelompok umur bekerja, seharusnya para imigran memberi kontribusi fiskal yang cukup besar kepada Prancis. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini terjadi karena masalah pengangguran adalah salah satu masalah terbesar yang dialami oleh imigran. Sebaliknya Prancis harus menyediakan dana untuk kesejahteraan para imigran dan juga keluarganya yang diajak bergabung dengan mereka untuk datang ke Prancis.²¹

²¹ Airin Miranda, “*Masalah Integrasi di Perancis*”, Karya Ilmiah, Program Studi Perancis FIB UI.

Grafik 4.2. Data Pengangguran di Perancis



Sumber : Unemployment rate, INSEE

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Perancis menguntungkan Perancis dengan menurunnya tingkat pengangguran yang ada di Perancis dari tahun dikeluarkannya kebijakan ke tahun setelahnya yaitu tahun 2011.

C. Public Order

Di Perancis, imigran yang datang bukan hanya imigran yang resmi namun banyak imigran yang tidak resmi ataupun illegal seperti imigran etnis Roma ini. Dengan tidak adanya surat izin tinggal yang dimiliki oleh imigran illegal inilah yang membuat mereka pada akhirnya tinggal di daerah kumuh dipinggiran kota. Etnis Roma sendiri mendirikan kamp-kamp illegal di daerah Choisy-le-Roi di selatan kota Paris, setelah pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Perancis etnis ini tidur di kolong jembatan ataupun trotoar pinggir jalan. Sebelumnya mereka juga

tinggal di mobil caravan ataupun tenda-tenda yang didirikan di pinggir jalan tol.²²

Sarkozy mengatakan bahwa ia tidak menginginkan adanya penciptaan daerah kumuh, karena mengganggu tata ruang kota dan keindahan dari Perancis sendiri.

²² “*Warga Etnis Roma Mulai diusir dari Perancis.*” www.dw.com. 7 november 2017.